



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asnawi Abdullah

Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Budi G. Sadikin

Jabatan : Menteri Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kesehatan,

Budi G. Sadikin

Pihak Pertama
Kepala Badan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan,

Asnawi Abdullah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN


No.	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Sasaran Strategis (10)		
	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif	Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	100
	Program : Pelayanan Kesehatan dan JKN		
1.	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC	1. Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan 2. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi pembiayaan kegiatan promotif preventif pada SPM	100 75
B.	Sasaran Strategis (11)		
	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)	Proporsi <i>Out Of Pocket</i> (OOP) terhadap total belanja kesehatan	20
2.	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) bidang kesehatan	100
C.	Sasaran Strategis (16)		
	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan	81
	Program : Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
3.	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	1. Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien 2. Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti 3. Terbangunnya tata kelola kerja sama internasional yang efektif	100 100 1

No.	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
D.	Sasaran Strategis (17)		
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		
	Program : Dukungan Manajemen		
4.	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	90,01
		2. Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	80,1
		3. Persentase realisasi Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	96

Program	Anggaran
1. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp. 11.479.560.000
2. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp. 257.480.455.000
3. Program Dukungan Manajemen	Rp. 71.019.949.000
Total Anggaran DIPA Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp. 339.979.964.000

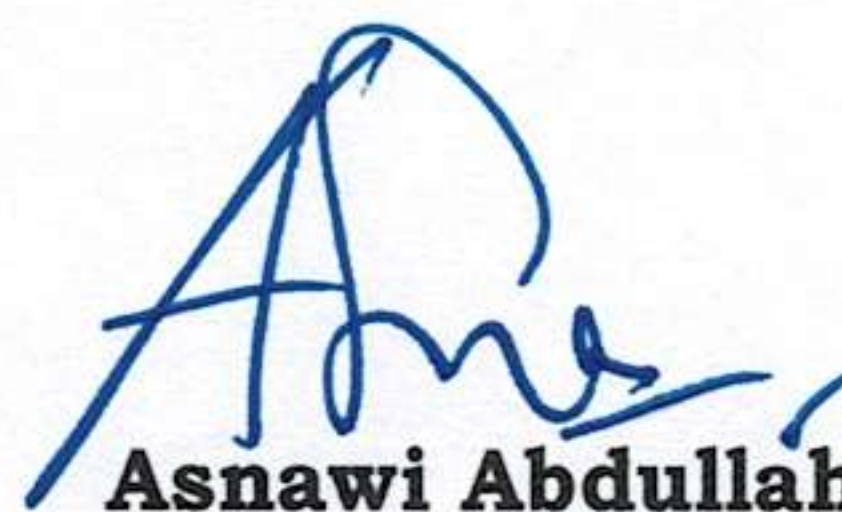
Jakarta, 8 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kesehatan,



Budi G. Sadikin

Pihak Pertama
Kepala Badan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan,



Asnawi Abdullah